

**PENGARUH INFLASI, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENAGIHAN  
PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat S1 Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Nirma Chamidah**

**NIM : 31402000112**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**SKRIPSI**

**PENGARUH INFLASI, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENAGIHAN**

**PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN**

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

**Disusun oleh :**

**Nirma Chamidah**

**NIM : 31402000112**

**Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

**Semarang, 12 Desember 2024**

**Pembimbing**



**Sri Sulistyowati, S.E.,M.Si**

**NIK. 211403017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirma Chamidah

NIM : 31402000112

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Inflasi, Self Assessment System, Penagihan Pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN)

Menyatakan benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

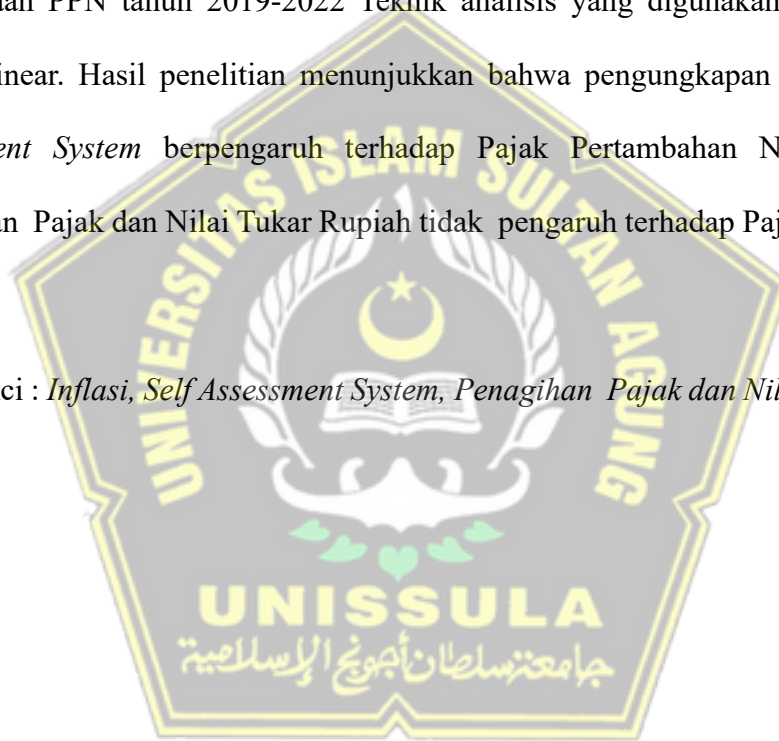
Pati, 12 Desember 2024

Nirma Chamidah

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *Self Assessment System*, Penagihan Pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN) Sampel dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan PPN tahun 2019-2022 Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Inflasi dan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan Penagihan Pajak dan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

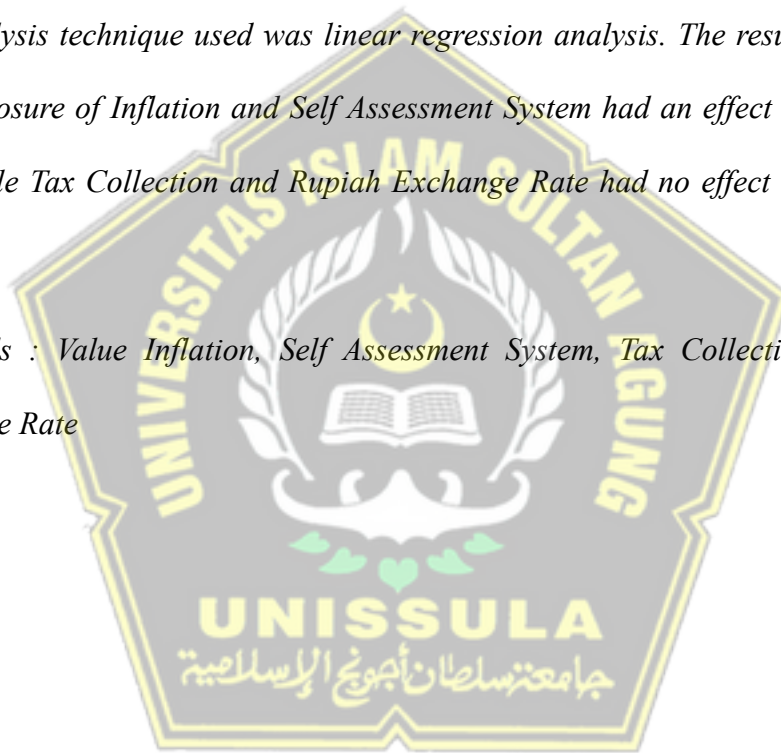
Kata kunci : *Inflasi, Self Assessment System, Penagihan Pajak dan Nilai Tukar Rupiah*



## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of Inflation, Self Assessment System, Tax Collection and Rupiah Exchange Rate on Value Added Tax (VAT) revenue. The sample in this study were all individual taxpayers, inflation rate, rupiah exchange rate, number of Tax Returns (SPT) and VAT revenue in 2019-2022. The analysis technique used was linear regression analysis. The results showed that the disclosure of Inflation and Self Assessment System had an effect on Value Added Tax, while Tax Collection and Rupiah Exchange Rate had no effect on Value Added Tax.*

*Keywords : Value Inflation, Self Assessment System, Tax Collection and Rupiah Exchange Rate*

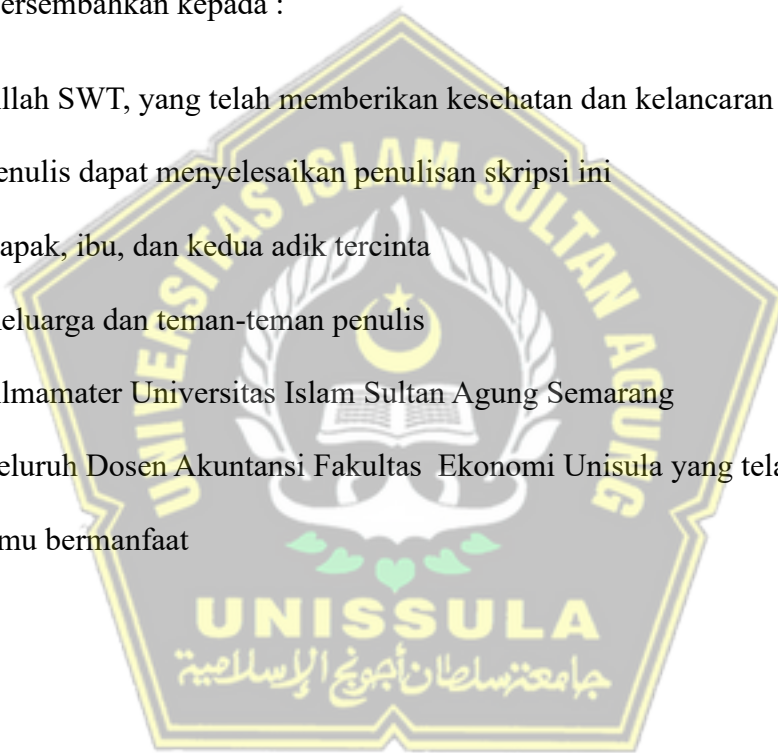


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat." - Winston Churchill

Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Bapak, ibu, dan kedua adik tercinta
3. Keluarga dan teman-teman penulis
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula yang telah memberikan ilmu bermanfaat



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembahasan penelitian skripsi yang berjudul " Pengaruh Inflasi, *Self Assessment System*, Penagihan Pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN)". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1 .Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua saya serta serta adik yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, pengorbanan serta doa dan kasih sayang tak terkira.
3. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Hj.Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., CIISA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi serta Bapak dan Ibu Staff Karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal berupa ilmu dan pengetahuan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.



Pati, 12 Desember 2024

**Nirma Chamidah**

**NIM : 31402000112**



## DAFTAR ISI

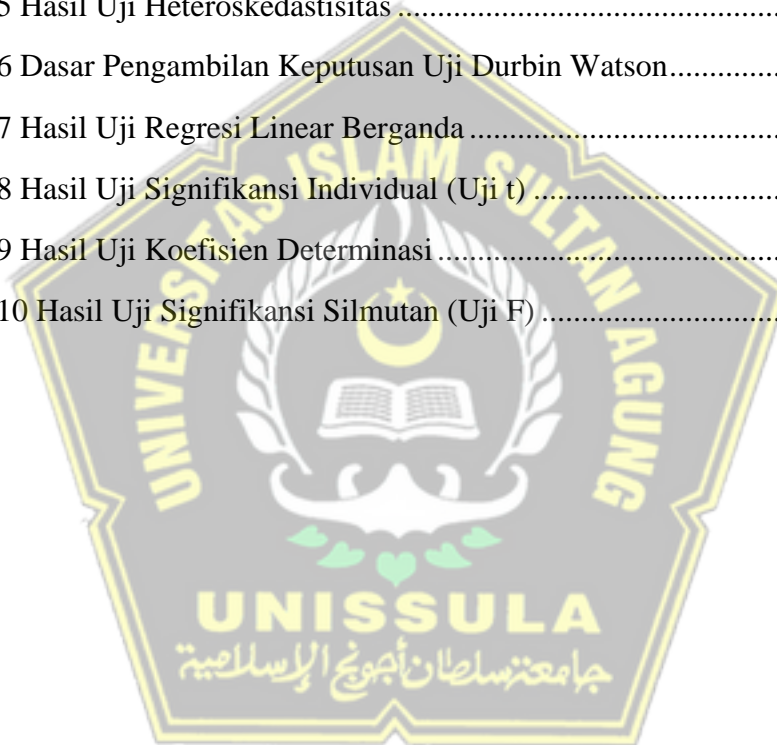
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Kajian Pustaka.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Agency Theory.....	10
2.1.2 Inflasi .....	11
2.1.3 Self Assessment System.....	12
2.1.4 Penagihan Pajak .....	13
2.1.5 Nilai Tukar Rupiah.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	18
2.3.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	18

2.3.2 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
2.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
2.3.4 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	21
2.4 Kerangka Penelitian .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Populasi dan Sampel .....	23
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	24
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.5 Variabel dan Indikator.....	25
3.5.1 Variabel Dependen (variabel terikat).....	25
3.5.2 Variabel Independen (variabel bebas).....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif .....	28
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.7 Uji Hipotesis .....	30
3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Deskripsi Sampel .....	33
4.2 Deskripsi Variabel.....	35
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	36
4.3.1 Uji Normalitas .....	36
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	39
4.3.3 Uji heteroskedastisitas.....	40
4.3.4 Uji Auto Korelasi .....	42

4.4 Hasil Regresi .....	43
4.4.1 Model Regresi Linier Berganda .....	43
4.5 Pengujian Hipotesis .....	44
4.5.1 Uji Parsial (uji t) .....	44
4.6 Goodnes of Fit .....	47
4.6.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R2) .....	47
4.6.2 Uji Signifikan Simultan (uji satistik F) .....	48
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	48
4.7.1 Pengaruh nilai Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN .....	48
4.7.2 Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN .....	49
4.7.3 Pengaruh nilai Inflasi terhadap penerimaan PPN .....	50
4.7.4 Pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan PPN .....	51
BAB V PENUTUP .....	53
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Implikasi .....	54
5.3 Keterbasan Penelitian .....	55
5.4 Saran .....	55
Daftar Pustaka .....	56
Lampiran .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	33
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	39
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolineritas .....	40
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	41
Tabel 4. 6 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson.....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t) .....	44
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Silmutan (Uji F) .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	22
---------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Inflasi .....	58
Lampiran 2 Self Assessment System .....	58
Lampiran 3 Penagihan Pajak .....	59
Lampiran 4 Nilai Tukar Rupiah .....	59
Lampiran 5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembangunan nasional di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Peranan penerimaan pajak semakin penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (Alfiyani Nur Hidayanti, 2024).

Penerimaan pajak menjadi tumpuan utama dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Lebih dari 80% belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak dan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya (Marta & Dasuki, 2022). Menurut (Setiawan Junianto, 2020) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini disetor oleh PKP yang telah dikukuhkan oleh DJP dengan bentuk barang atau jasa di dalam daerah pabean serta penyetorannya dilakukan setiap akhir bulan. Penerimaan pajak ini mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan negara baik secara nominal atau persentase ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor. Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam membantu Negara untuk membiayai pengeluaran, namun Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berbeda dengan Pajak Penghasilan, pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain. Data wajib pajak perusahaan yang tidak melaporkan SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini menandakan bahwa wajib pajak belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Marta & Dasuki, 2022). *Self Assessment System* ialah salah satu bentuk metode memungut pajak oleh wajib yang dipercayakan dan bertanggungjawab untuk melakukan penentuan sendiri berapa pajak yang menjadi utang pada tiap tahun berdasarkan aturan dalam perundangan yang sudah ditetapkan (Kurnia&Azzahra, 2024). Dalam melaksanakan *Self Assessment System*, mungkin sangat penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan beban komitmen yang belum sepenuhnya diselesaikan. (Desmon & Hairudin, 2020), memberikan pandangan kepada mereka bahwa konsistensi dengan Wajib Pajak (WP) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kerangka penilaian diri, karena kerangka ini memungkinkan Wajib Pajak (WP) yang diharapkan untuk tidak menyelesaikan komitmennya. ketetapan pajak karena kecerobohan,



kesengajaan, atau kelalaian Wajib Pajak (WP) terhadap kewajibannya yang akan mempengaruhi pemungutan pendapatan. Menurut (Desmon & Hairudin, 2020) kerangka evaluasi diri adalah kerangka pemilahan tugas yang menyetujui Wajib Pajak (WP) untuk memutuskan jumlah atau beban mutlak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan pedoman penilaian material. Seperti yang ditunjukkan oleh (Marta & Dasuki, 2022) *Self Assessment System* mempengaruhi review biaya, penelitian itu dapat menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai asset yang tinggi maka akan menanggung beban pajak yang bersifat tinggi juga. Dan pada temuan oleh (Satriawaty Migang, 2020) mengenai seberapa berpengaruhnya *Self Assessment System* terhadap penerima pajak peningkatan nilai (PPN) diperoleh data positif yang menyatakan kesignifikannya terhadap wajib pajak yang melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak sehingga pendapatan negara di PPN menjadi naik.

Surat tagihan pajak ialah surat yang dipakai ketika penagih pajak datang untuk meminta pajak serta memberikan ketetapan sanksi dengan pembayaran sejumlah denda ataupun tambahan pembayaran. Karena terlihat penambahan dari tahun ketahunnya, sehingga pengeluaran dari surat tagihannya bertujuan untuk para wajib pajak dapat mematuhi ketentuan pajak yang mesti dibayarkan oleh mereka baik dalam bentuk kewajiban pribadi ataupun badan usaha (Febriana, 2022). Didasarkan kepada UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan yang mendasari merubah UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 No. 15 Surat ketetapan pajak ialah surat yang menetapkan diantaranya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), serta SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar). Kemudian merujuk pada keputusan Ditjen Pajak, yang boleh membuat surat ini ialah petugas dari KPP (Kantor Pajak Pratama) serta pengeluarannya didasarkan hasil setelah memeriksa pajaknya. Menurut (Nadia & Kartika, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus (Nadia & Kartika, 2020) Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak akan lebih baik karena penurunan inflasi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan rumah tangga. Penurunan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penurunan inflasi akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan PPN. Secara historis, tingkat inflasi Indonesia lebih tinggi jika dibanding dengan negara-negara berkembang lain. Sementara negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi di antara 3 - 5 persen per tahun

pada periode 2005 - 2014, Inflasi tahunan di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 8,5 persen dalam periode yang sama. Sejak mulai dari tahun 2015 inflasi di Indonesia boleh dikatakan terkendali. Masalah inflasi selalu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah karena sifatnya yang fluktuasi dan pada Maret 2018 mencapai 3,40% yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut (Amelia et al., 2023) dalam penelitiannya menerangkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, dimana jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Mahadiva Putri, 2024) bahwa Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya jika tingkat inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Nilai tukar mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah melemah maka akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat meningkat yang kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi (Ana Arifatunnisa, 2022.). Pada Penelitian (Sapridawati et al., 2021a) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “Nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hal ini

dikarenakan nilai tukar rupiah memengaruhi harga BKP (Barang Kena Pajak) /JKP (Jasa Kena Pajak), terutama BKP (Barang Kena Pajak) / JKP (Jasa Kena Pajak) yang membutuhkan barang modal dari luar negeri dan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat akan naik yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh John Henry Wijaya (2022) dan Satriawaty Migang (2020). Ada beberapa poin-poin yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini berorientasi pada Penerapan *Self Assessment System*, pengaruh inflasi, penagihan pajak dan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan PPN. Hasil dari penelitian oleh John Henry Wijaya (2022) menggunakan inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak sebagai variabel independent yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan PPN berdasarkan penelitian Satriawaty Migang (2020). Berdasarkan hasil penelitian John Henry Wijaya (2022), disimpulkan bahwa koefisien determinasi hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,437 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah dalam penelitian ini adalah sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar 56,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian

ulang dengan menambahkan variabel *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak yang diambil dari penelitian (Satriawaty Migang, 2020).

Uraian di atas menjadi dasar penulis dengan mengangkat judul penelitian "PENGARUH INFLASI, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENAGIHAN PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Self Assessment System* mempengaruhi penerimaan PPN?
2. Bagaimanakah Inflasi mempengaruhi penerimaan PPN?
3. Bagaimanakah Nilai tukar rupiah mempengaruhi penerimaan PPN?
4. Bagaimanakah Penagihan pajak mempengaruhi penerimaan PPN ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN.
2. Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN.
3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan PPN.
4. Pengaruh Penagihan pajak terhadap penerimaan PPN.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Untuk penulis  
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama di dunia kerja dalam bidang perpajakan. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana.
2. Bagi Wajib Pajak Pribadi

Sebagai bahan pertimbangan oleh para wajib pajak pribadi untuk dapat membayarkan kewajiban perpajakannya khususnya di bidang pajak pertambahan nilai. Untuk dapat menambah kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak serta melatih ketaatan, kesadaran dan kejujuran membayar pajak.

### 3. Bagi Pihak Penagih Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan perpajakan dengan benar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan upaya meningkatkan pemahaman tentang perpajakan sehingga mampu menyadarkan para wajib pajak untuk membayar dan memahami peran penting serta manfaat dari pajak yang dibayarkan. Bagi pihak penagih pajak untuk dapat lebih meningkatkan efektifitas meningkatkan kualitas agar menjadi pemungut pajak yang profesional, jujur dan tegas dalam menjalankan tugas negara.

### 4. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu dan dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Agency Theory**

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Zimmerman (1978) merupakan teori yang menghubungkan antara prinsipal dan agent. Dimana prinsipal adalah pihak yang memberi wewenang dan agent adalah pihak yang dipercaya untuk diberikan wewenang. Menurut Scott (2015) konsep agency theory adalah suatu hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agent, yang mana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Pada prakteknya, prinsipal dan agent tidak selalu sejalan dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara keduanya. Jika dikaitkan dengan perpajakan dimana pemerintah sebagai pihak yang memberi wewenang memberi kepercayaan penuh kepada otoritas perpajakan dan masyarakat untuk menjalankan wewenangnya (melalui mekanisme *Self Assesment System*) agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Selain itu, apabila penerimaan pajak suatu daerah telah melampaui target, maka dapat dikatakan konflik keagenan yang disebabkan faktor inflasi, nilai tukar mata uang asing dan penagihan pajak cukup rendah dikarenakan wajib pajak telah melakukan kewajibannya dengan benar sesuai UU perpajakan. Rendahnya konflik keagenan ini berdampak pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak negara.



### 2.1.2 Inflasi

Menurut Boediono (1985), ialah kecenderungan harga-harga secara general mengalami peningkatan atau keadaan dimana nilai uang terus menurun. Inflasi disebut kenaikan harga barang atau jasa secara berkelanjutan sepanjang suatu periode waktu (Marta & Dasuki, 2022). Lalu (Nadia & Kartika, 2020) inflasi dipandang sebagai fenomena uang karena perubahan nilai terjadi di berbagai masyarakat atau komoditas. Saat terjadi inflasi ketika harga secara terus menerus mengalami kenaikan sedangkan tingkat konsumsi masyarakat menurun, hal tersebut mengakibatkan uang yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan (Desmon & Hairudin, 2020). Terjadinya inflasi akan menunjukkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa menurun, sedangkan penerimaan PPN sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi agar tingkat konsumsi tetap stabil, sehingga akan memiliki dampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu ketika harga-harga secara umum turun dibandingkan periode sebelumnya (dikurangi inflasi). Akibat inflasi secara umum daya beli masyarakat menurun karena secara riil tingkat pendapatan mereka juga menurun. Jadi, misalnya, jika tingkat inflasi pada tahun berjalan meningkat sebesar 5%, sedangkan pendapatan tetap, ini berarti bahwa secara riil, pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akan mengakibatkan daya beli relatif kurang dari 5%. sama bagusnya (Salman Said et al., 2021).

### 2.1.3 Self Assessment System

*Self Assessment System* dikenal setelah terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dimana sistem yang dipakai sebelumnya adalah *Official Assessment System*. Menurut (Salman Said et al., 2021) *Self Assessment System* berarti kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke negara. (Salman Said et al., 2021) menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan *Self Assessment System* mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku menurut (Salman Said et al., 2021). Menurut (Salman Said et al., 2021) *Self Assessment System* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ada beberapa syarat yang diperlukan dan yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan *Self Assessment System* adalah Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*). Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*) diharuskan mempunyai keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*) melakukan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.4 Penagihan Pajak**

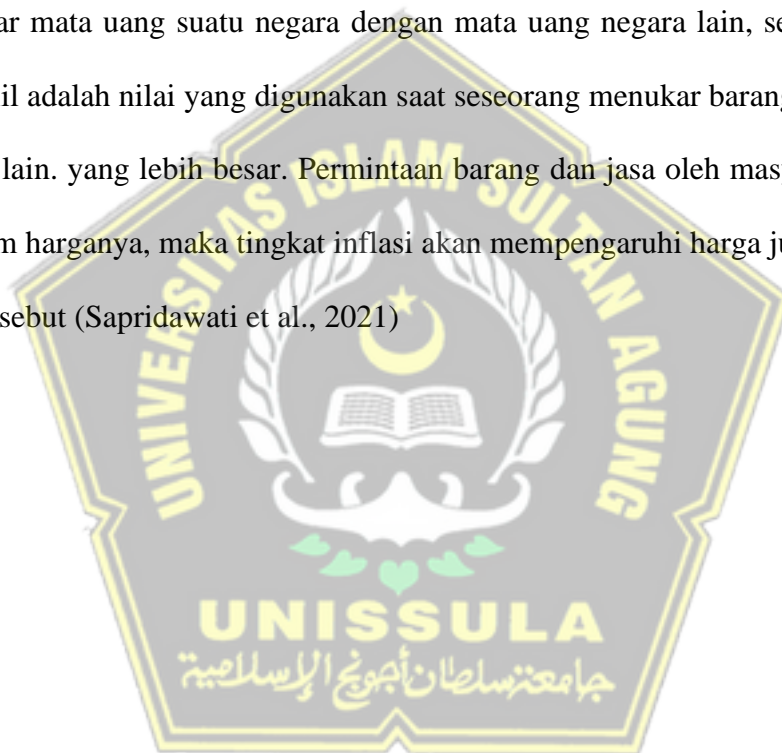
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. bahwa penagihan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai tunggakan pajak dalam satu bulan (Febriana, 2022). Sementara itu penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki tanggung jawab atas tagihan pembayaran pajak. Penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 yang dimana peraturan tersebut telah berjalan sejak 23 Mei 1997 sejak 1 Januari 2000. Atas dasar berapa bea akumulasi, yang didasarkan pada membuat bagaimana banyak biaya menanggung kenaikan angsuran, yang dalam hal Penanggung Pajak tidak menyebabkan angsuran yang telah disesuaikan. dengan pedoman dalam waktu melakukan pemilahan biaya dengan Surat Paksa sesuai pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran. Dibebaskan dari saat dan pengisian jumlah tunggal dilakukan jika: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia karena suatu alasan atau alasan tertentu; b. Penanggung Pajak memindahkan barang yang diklaim atau

dipaksakannya untuk menghentikan atau membatasi pelaksanaan perserikatan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Ada tanda-tanda pengangkut biaya akan bubar unsur usaha atau serikat pekerja atau mengembangkan usaha, atau memindahkan organisasi yang dimiliki atau dibatasi olehnya, atau mengadakan perbaikan-perbaikan yang berbeda dalam strukturnya. Menurut (Sapridawati et al., 2021) Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.

#### **2.1.5 Nilai Tukar Rupiah**

Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam (Desmon & Hairudin, 2020), Suatu nilai tukar adalah kurs antara satu unit mata uang dan sejumlah mata uang lainnya yang dapat dipertukarkan pada waktu tertentu . Menurut (Nur Fitri et al., 2020.), nilai tukar suatu mata uang adalah acuan dimana Bank Sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi dalam mata uang lokal dengan mata uang asing di pasar negara yang bersangkutan. pasar pertukaran. Nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang mewakili satuan mata uang nasional yang diperlukan untuk memperoleh satu satuan mata uang asing.

Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang dijadikan acuan untuk memperoleh satuan mata uang tertentu dengan menggunakan mata uang tertentu, mata uang tertentu pada waktu tertentu dan sebagai ditetapkan oleh Bank Sentral negara yang bersangkutan. Terdapat dua jenis nilai tukar yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, sedangkan nilai tukar riil adalah nilai yang digunakan saat seseorang menukar barang dan jasa dari negara lain. yang lebih besar. Permintaan barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa tersebut (Sapridawati et al., 2021)



**Tabel 2.1**  
**2.2 Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	John Henry Wijaya(2022)	Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2017-2021	-Inflasi  -Nilai Tukar rupiah	Inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)
2	Sitti Mispa(2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Makassar Selatan	- <i>Self Assessment System</i> -Pemeriksaan pajak	<i>Self Assessment System</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3	Cyntia Febriana dan Limajatini(2022)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	- <i>Self Assessment System</i> - Pemeriksaan Pajak -Penagihan Pajak	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh pada PenerimaanPajak Pertambahan Nilai.
4	Satriawaty Migang (2020)	Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan	- <i>Self Assessment System</i>  - Pemeriksaan Pajak  -Penagihan Pajak	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5	Tito Marta Sugema Dasuki(2022)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan	- <i>Self Assessment System</i> - Pemeriksaan Pajak	<i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh padaPenerimaan

				Pajak Pertambahan Nilai.
6	Razif &Alqonitur Rasyidah2(20 19)	Pengaruh <i>Self Assessment System, Money Ethics</i> , Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa)	- <i>Pengaruh Self Assessment System</i> - <i>Money Ethics</i> -Teknologi Dan Informasi	<i>Self Assessment System, Money Ethics</i> , dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i> berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion.
7	Ana Arifatunnisa (2022)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	-Jumlah Pengusaha Kena Pajak -Tingkat Inflasi -Nilai Tukar Rupiah	-Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). -Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). -Nilai tukar rupiah atas dollar AS tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.3.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atau jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Hubungan teori tersebut dalam penelitian ini bahwa masyarakat harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan besar kebutuhannya terhadap pemerintah, agar penerimaan pajak penghasilan stabil. Penagihan pajak adalah proses suatu tindakan yang dijalankan terhadap penanggung pajak itu sendiri agar dapat membayar tagihan atau utang pajak yang memang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Sementara itu penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki tanggung jawab atas tagihan pembayaran pajak. Penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 yang dimana peraturan tersebut telah berjalan sejak 23 Mei 1997 sejak 1 Januari 2000. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang dilakukan (Febriana, 2022), penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H1: Pengaruh Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**



#### **2.3.4 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tujuan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dengan menjaga stabilitas indikator makroekonomi, salah satunya adalah indeks makroekonomi nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau depresiasi akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat sedangkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sapridawati et al., 2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H2: Pengaruh Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.3.1 Pengaruh Inflasi terhadap Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat. Selain faktor-faktor kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, ada pula faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah faktor inflasi yang cenderung fluktuatif. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang secara umum sehingga inflasi akan mempengaruhi impor suatu negara berkembang lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah (Rahmawati et al., 2018.). Impor tersebut dapat membebani sektor usaha yang memaksa mereka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya sehingga dapat menyebabkan sektor individu maupun sektor usaha kehilangan penghasilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mahadiva Putri, 2024) .Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H3: Variabel Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

### 2.3.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

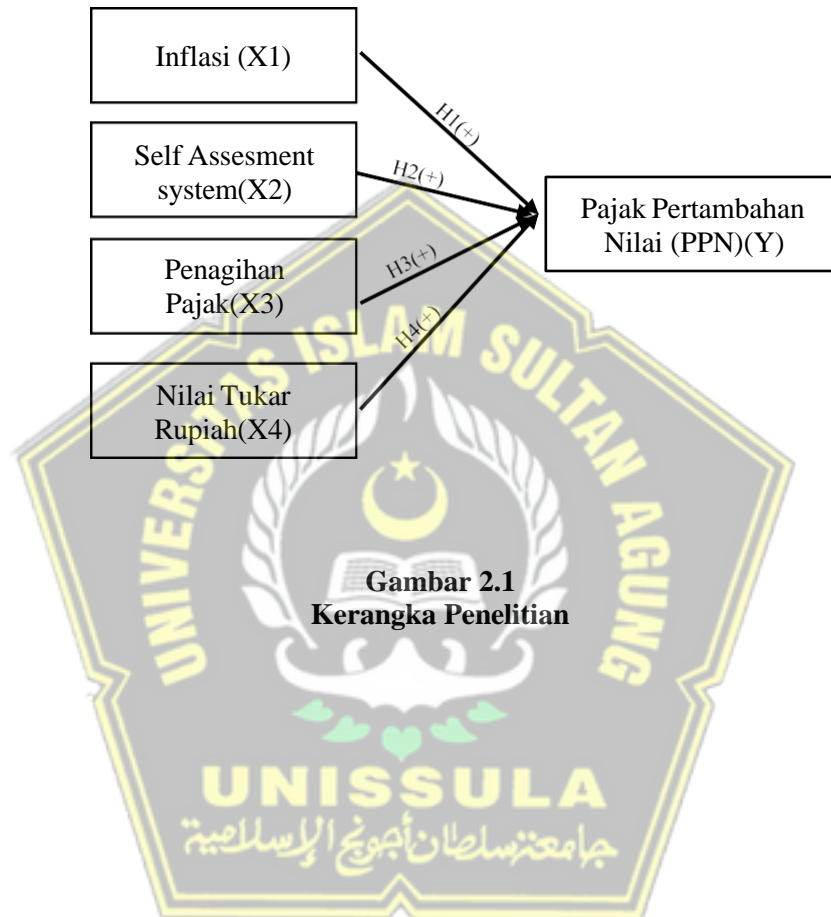
*Self Assessment System* adalah sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia yang mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Melalui sistem ini diharapkan terjadi efisiensi dalam pengelolaan pajak dan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan (Migang, 2020) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *Self Assessment System* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Sitti Mispa (2019) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H4: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN.**

## 2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis diatas , maka digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pelaksanaan suatu penelitian harus ditentukan metode apa yang akan dipakai karena menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengarahkan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian. Pemilihan dan penentuan metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian sangat berguna bagi peneliti karena dengan pemilihan dan penentuan metode yang tepat dapat membantu dalam mencapai tujuan penelitian sehingga pemilihan metode tersebut harus tepat. Pada Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan korelasional yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel penelitian. Penelitian ini menjelaskan pengaruh inflasi, self assessment system, penagihan pajak dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki mutu serta ciri tertentu yang diresmikan oleh seorang peneliti guna dipergunakan untuk dipelajari sehingga kemudian akan ditarik kesimpulan untuk hasil akhirnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan PPN.

Sampel menurut Sugiyono (2018) adalah bagian dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut, dengan kata lain sampel merupakan metode dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian atas setiap populasi yang hendak akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pajak Orang Pribadi selama periode 2019– 2022.(Januari-Desember)
2. Tingkat Inflasi periode 2019 –2022.(Januari-Desember)
3. Nilai Tukar Rupiah 2019-2022(Januari-Desember)
4. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) (Januari-Desember)
5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Januari-Desember)

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang berasal dari informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Data penelitian ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS), website Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan website Bank Indonesia (BI) selama periode 2019-2022.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui buku, jurnal, berita, serta perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian lapangan, dengan cara pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan yang dapat diakses dari website Badan Pusat Statistik (BPS), website Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan website Bank Indonesia (BI).

### **3.5 Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1 Variabel Dependen (variabel terikat)**

Menurut Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa variabel Dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **3.5.2 Variabel Independen (variabel bebas)**

Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu sebagai berikut :

##### *3.5.2.1 Self Assesment System*

Menurut Mardiasmo (2016) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Self Assessment System dapat dilihat dari perbandingan jumlah SPT masa PPN saat ini dikurang jumlah SPT masa bulan lalu dengan jumlah SPT bulan lalu.

$$\frac{\text{jumlah SPT masa PPN saat ini} - \text{Jumlah SPT masa bulan lalu}}{\text{jumlah SPT bulan lalu}} \times 100\%$$

### 3.5.2.2 Nilai Tukar Rupiah

Pengukuran nilai tukar dalam penelitian ini menggunakan kurs tengah, seperti yang dijelaskan oleh (Salman Said et al., 2021) kurs tengah, yaitu: Kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu. Untuk mendapatkan kurs tengah sendiri menurut Mahyus Ekananda (2014) nilai kurs tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{kurs beli} + \text{kurs jual}}{2} = \text{nilai tukar rupiah}$$

Keterangan: Kb : Kurs beli

Kj : Kurs jual

### 3.5.2.3 Penagihan Pajak

Menurut (Salman Said et al., 2021) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. bahwa penagihan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai



tunggakan pajak dalam satu bulan.

$$\frac{\text{jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{jumlah tunggakan pajak setiap bulan}} \times 100\%$$

#### 3.5.2.4 Inflasi

Pengukuran inflasi dalam penelitian ini menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), seperti yang dijelaskan oleh Mankiw, Quah dan Wilson (2012), yaitu: Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Menurut M. Natsir (2014) inflasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

IHK<sub>n</sub> : Indeks Harga Konsumen Tahun ke-n

IHK<sub>n-1</sub> : Indeks Harga Konsumen pada Tahun Sebelumnya (n-1)

### 3.6 Teknik Analisis Data

### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah pengujian data yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran data dari inflasi, *self assessment system*, penagihan pajak dan nilai tukar rupiah pada sampel yang digunakan dalam penelitian.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi suatu penelitian. Setelah melakukan uji statistik deskriptif, selanjutnya melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, menurut (Ghozali, 2018). Uji normalitas digunakan sebagai tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah uji statistik *non-parametrik kolmogorov-smirnov test* dan grafik normal *probability plot of standardized regression residual*, menurut (Ghozali, 2018). Syarat uji statistik *non-parametrik kolmogorov-smirnov test* dinyatakan signifikan apabila nilai  $> 0,05$  maka data dapat dikatakan sebagai berdistribusi normal begitu juga sebaliknya jika *kolmogorov-smirnov test* tidak dinyatakan signifikan bila nilai  $< 0,05$ , maka data berdistribusi tidak normal.

## 2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*, menurut (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas bertujuan sebagai menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut (Ghozali, 2018), multikorelasi dapat dideteksi melalui output SPSS pada table *Coefficients*. Dikatakan terbebas dari *multikolinieritas* jika nilai tidak lebih dari 10 *Variance Inflation Factor(VIF)* dan nilai Toleransi (TOL) tidak kurang dari 0,10. Dikatakan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya jika nilai  $VIF > 10$  dan nilai tolerance value  $< 0,10$ . Semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance.

## 3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan sebagai pengujian apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain, menurut (Ghozali, 2018). Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diteksi dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik yaitu: (a) Dapat dikatakan heteroskedastisitas jika, terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit); (b) Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

## 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi. Jika ditemukan adanya korelasi maka dikatakan terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin- Watson .Dimana jika angka D-W dibawah -2 ada Autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada Autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif. Penelitian dengan data yang baik adalah data penelitian yang tidak mengandung korelasi maupun korelasi negatif (Ghozali, 2018)

### 3.7 Uji Hipotesis

#### 3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018) penggunaan regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas. Analisis regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS dengan persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

X1 = Variabel Independen (Inflasi)

X2 = Variabel Independen (*Self Assessment System*) X3 = Variabel Independen

(Penagihan Pajak)

X<sub>4</sub> = Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)

e = Variabel pengganggu (*error*)

Kemudian langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, dilakukan dengan cara melakukan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi,.

1. Uji signifikan Parsial (uji statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikansi variabel independen (bebas) secara individual terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian dengan tingkat level of significance  $\alpha = 5\%$  yaitu: jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima dan jika lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

2. Goodness Of Fit

A. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X (Ghozali, 2018). Apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati 0 (nol) artinya lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati 1 artinya kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2018)

B. Uji signifikan simultan (uji statistik F)

Uji signifikan simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Jika nilai

signifikansi  $F < 0,05$ , maka model penelitian berpengaruh pada penelitian dan sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Sampel

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *Self Assessment System*, Penagihan Pajak Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2019 – 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Data tersebut diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS), website Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan website Bank Indonesia (BI).

Populasi penelitian ini adalah seluruh data tagihan wajib pajak orang pribadi, inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik dokumentasi (pengumpulan data) dengan hasil pengambilan sampel sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Pengambilan sampel dengan Teknik dokumentasi (pengumpulan data):	
1. Penagihan Pajak selama periode 2019 – 2022.(Januari- Desember)	48
2. Tingkat Inflasi periode 2019 – 2022.(Januari- Desember)	48
3. Nilai Tukar Rupiah 2019-2022 (Januari-Desembar)	48
4. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) (Januari- Desember)	48
5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	48



## 4.2 Deskripsi Variabel

Hasil dari pengumpulan data yang di peroleh di dapatkan hasil deskriptif masing – masing variabel seperti dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Inflasi	48	1.32	5.95	2.7077	1.27822
Self Assessment System	48	6.116	912	54.7146	173.655825
Penagihan Pajak	48	10.120.426	896.032.965	150.805.998,3	185.698.526,9
Nilai Tukar Rupiah	48	13,662.00	16,367.00	14504.35	523.361
PPN	48	351465474	1367913715	663109809.9	242860977.3
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel penerimaan PPN memiliki nilai terendah sebesar 351465474 dan nilai tertinggi sebesar 1367913715 dengan nilai rata-ratanya sebesar 663109809.94 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar . 242860977.254 Variabel Inflasi memiliki nilai terendah sebesar 1.32 dan nilai tertinggi sebesar 5.95 dengan nilai rata-ratanya sebesar 2.7077 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 1.27822.Variabel *Self Assessment System* memiliki nilai terendah sebesar 6.116 dan nilai tertinggi sebesar 912.000 dengan nilai rata-ratanya sebesar 54.71460 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 173.655825. Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai terendah sebesar 10.120.426 dan

nilai tertinggi sebesar 95.873.402 dengan nilai rata-ratanya sebesar 150.805.998,3 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 185.698.526,9. Variabel Nilai Tukar Rupiah memiliki nilai terendah sebesar 13,662.00 dan nilai tertinggi sebesar 16,367.00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 14504.35 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 523.361.

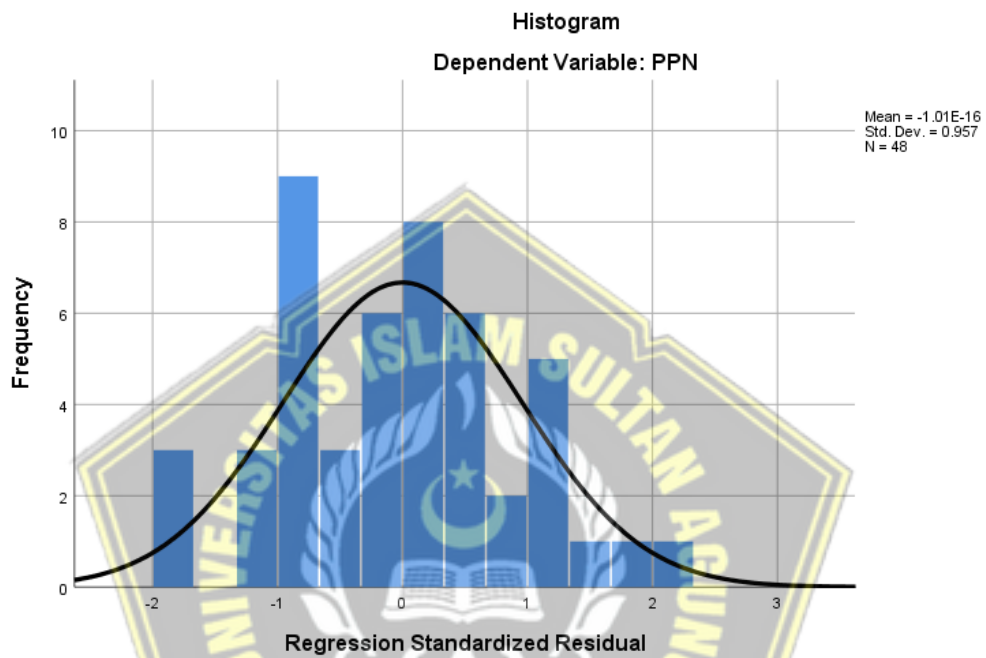
#### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan serangkaian uji asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

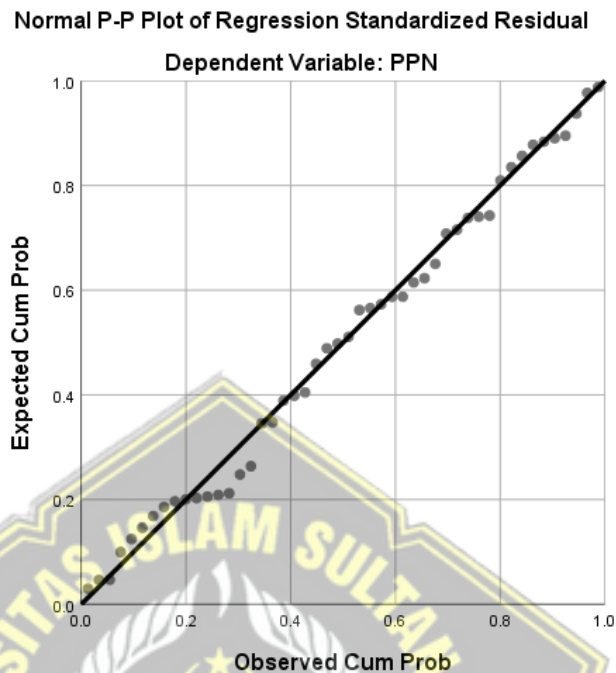
##### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik Normal Probability Plot.

Gambar Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



Sumber : Data sekunder diolah, 2024



Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik Normal Probability Plot dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal (tidak terjadi kemencengan), demikian juga pada grafik Normal Probability Plot terlihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

Dari hasil uji normalitas pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa plot data (sebesar data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat dikatakan normal. Untuk mendukung pernyataan ini maka pengujian P-Plot di lengkapi dengan

pengujian uji statistik dengan menggunakan uji kolmogorv smirnov yang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	11.67488652
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.044
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh besarnya nilai kolmogorv smirnov adalah 0,90 dan signifikan pada 0,200. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel

independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: Tolerance > 0,10, dan nilai VIF < 5. Berikut tabel hasil pengujian multikolonieritas:

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penagihan Pajak	0.868	1.151
Nilai Tukar Rupiah	0.963	1.038
Inflasi	0.947	1.056
Self Assessment System	0.855	1.17

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai tolerance  $X_1 = 0,868$   $X_2 = 0,963$   $X_3 = 0,947$ . Nilai VIF setiap variabel independen juga lebih kecil dari 5.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastis dan jika berbeda disebut heterokedastis. Penelitian ini menggunakan uji *Spearman Rho* dengan kriteria apabila nilai signifikansi > 0,05 maka

tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

			<b>Unstandardized Residual</b>
Spearman's rho	Nilai Tukar Rupiah	Correlation Coefficient	-0,309
		Sig. (2-tailed)	<b>0,033</b>
		N	48
	Penagihan Pajak	Correlation Coefficient	0,284
		Sig. (2-tailed)	<b>0,050</b>
		N	48
	Inflasi	Correlation Coefficient	0,201
		Sig. (2-tailed)	<b>0,170</b>
		N	48
	Self Assessment System	Correlation Coefficient	-0,122
		Sig. (2-tailed)	<b>0,409</b>
		N	48

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan uji Spearman Rho diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,33 untuk nilai tukar rupiah , sebesar 0,50 untuk Penagihan Pajak , dan 0,170 untuk Inflasi serta 0,409 untuk *Self Assessment System*. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi

lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi. Jika ditemukan adanya korelasi maka dikatakan terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson. Penelitian ini merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan uji Durbin Watson adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Dasar Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson**

$0 < d \leq dL$	Tidak ada autokorelasi positif
$dL \leq d \leq dU$	Tidak ada autokorelasi positif
$4-dL < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif
$4-dU \leq d \leq 4-DI$	Tidak ada autokorelasi negatif
$dU < d < 4-dU$	Tidak ada autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.964

Sumber : Data sekunder diolah, 2024



Hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson diperoleh nilai sebesar 1,964. Dengan sampel berjumlah 48 (N), jumlah variabel independen 4(k = 4), dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05, maka akan di dapat nilai dU sebesar 1,7206 dan nilai dL sebesar 1,3619 terletak diantara  $dU < d < 4-dU$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data observasi.

#### 4.4 Hasil Regresi

##### 4.4.1 Model Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasinya

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9.940	6.036		1.647	.107
Penagihan Pajak	-.229	.136	-.233	-1.680	.100
Nilai Tukar Rupiah	.076	.130	.077	.589	.559
Inflasi	.392	.143	.365	2.753	.009
Self Assessment System	.390	.138	.397	2.839	.007

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 9.940 - 0,229 X_1 + 0,076 X_2 + 0,392 X_3 + 0,390 X_4 + e$$

- a) Konstanta sebesar 9.940 menunjukkan bahwa setiap intensitas inflasi sebesar 1% akan diikuti penurunan penerimaan pajak sebesar 9.940 dengan asumsi variabel lain tetap.
- b) X1 sebesar -0,229 menunjukkan bahwa setiap intensitas *self assessment system* 1% akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak sebesar -0,229 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) X2 sebesar 0,076 menunjukkan bahwa setiap intensitas penagihan pajak 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,076 dengan asumsi variabel lain tetap
- d) X3 sebesar 0,392 menunjukkan bahwa setiap intensitas nilai tukar rupiah 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,392 dengan asumsi variabel lain tetap.
- e) X4 sebesar 0,390 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PPN 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,390 dengan asumsi variabel lain tetap.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 25, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t)**

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Penagihan Pajak	-1.680	.100	<b>Ditolak</b>
Nilai Tukar Rupiah	.589	.559	<b>Ditolak</b>
Inflasi	2.753	.009	<b>Diterima</b>
Self Assessment System	2.839	.007	<b>Diterima</b>

*Sumber : Data sekunder diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas maka hasil uji signifikansi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis pertama yaitu Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji signifikansi individual menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.680 dengan nilai signifikansi 0,100. Nilai signifikansi 0,100 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 hal tersebut berarti bahwa Penagihan Pajak berpengaruh negative terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) **ditolak**

## 2 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis kedua adalah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji signifikansi individual menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,589 dengan nilai signifikansi 0,559. Nilai signifikansi 0,559 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 hal tersebut berarti bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) **ditolak**.

## 3 Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis ketiga yaitu Inflasi dapat berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,753 dengan nilai signifikansi 0,009. Nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 hal tersebut berarti bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) **diterima**.

## 4 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis keempat yaitu *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,839 dengan nilai signifikansi 0,007. Nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 hal tersebut

berarti bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>4</sub>) **diterima**.

## 4.6 Goodnes of Fit

### 4.6.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.525	.467	9.964

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai *Adjusted R Square*(R<sup>2</sup>) sebesar 0,467. Hasil ini berarti bahwa Penagihan Pajak, tingkat inflasi, *Self Assessment System* dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 46,7%. Sedangkan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.6.2 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien slope regresi secara bersamaan atau untuk menguji apakah koefisien regresi  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	378966268840302080.000	4	94741567210075520.000	1.702	.167 <sup>b</sup>
Residual	2393162081989817300.000	43	55654932139298080.000		
Total	2772128350830119400.000	47			

Tabel menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ( $0,167 > 0,05$ ). Jadi, hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan PPN)

#### 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.7.1 Pengaruh nilai Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel di atas, didapat t hitung untuk variabel Penagihan Pajak sebesar negatif 1.680 dengan tingkat signifikan sebesar 0,100 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena tingkat signifikan di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H1 **ditolak**.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024). Tindakan penagihan adalah usaha terakhir yang dilaksanakan agar para para pajak wajib pribadi tetap membayar pajak dengan tuntas sesuai aturan yang berlaku, yang mana perbuatan ini dilaksanakan supaya wajib pajak melakukan pelunasan tunggakan pajak serta dana atas penagihan pajak. Penagihan pajak tidak memberikan dampak atas penerimaan PPN karena terdapat PKP yang tidak menaati pajak seperti menghindari dan menunda pembayaran pajak sehingga tunggakan pajak semakin membesar, oleh karena itu meskipun penagihan telah dilakukan akan tetapi hal tersebut belum cukup optimal dan efektif dan tidak berdampak atas penerimaan PPN. Hasil pengujian ini juga sama dengan pengujian yang diadakan (Satriawati Migang, 2020) menjabarkan bahwasanya penagihan pajak tidak berdampak terhadap penerimaan PPN.

#### **4.7.2 Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN**

Hasil uji t pada tabel di atas, didapat t hitung untuk variabel nilai Tukar Rupiah sebesar 0,589 dengan tingkat signifikan sebesar 0,559 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena tingkat signifikan di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H1 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa nilai Tukar Rupiah terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan

PPN yang dilakukan oleh (Alfiyani, 2024). Apabila terjadi kenaikan nilai tukar rupiah atau melemah terhadap dollar maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun, selain itu kenaikan nilai tukar juga akan berakibat pada kenaikan biaya produksi sehingga harga produk barang dan jasa juga akan meningkat dan daya beli masyarakat menurun dan penurunan penerimaan PPN. Hasil pengujian ini juga sama dengan pengujian yang diadakan oleh (Ana Arifatunnisa, 2022) yang menjabarkan bahwasanya nilai tukar rupiah tidak berdampak terhadap penerimaan PPN.

#### **4.7.3 Pengaruh nilai Inflasi terhadap penerimaan PPN**

Hasil uji t pada tabel di atas, didapat t hitung untuk variabel inflasi sebesar 2.753 dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 (lebih kecil dari 0,05). Oleh karena tingkat signifikan di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H3 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh (Mahadiwa Putri Diya, 2023). Nilai pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau tingginya nilai inflasi maka harga barang untuk produksi yang harus dibayarkan oleh pkp semakin tinggi pula dan PPN yang dibayarkan oleh si PKP semakin besar juga, hal ini yang menjadikan penerimaan PPN semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh (Nadia & Kartika, 2020) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.



#### 4.7.4 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel di atas, didapat t hitung untuk variabel *Self Assessment System* sebesar 2.839 dengan tingkat signifikan sebesar 0,007 (lebih kecil dari 0,05). Oleh karena tingkat signifikan di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H4 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* terbukti berpengaruh terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024). Membuktikan bahwa dengan menerapkan *self assessment system* dapat membuat ketaatan subjek pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya dalam melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terhutang sudah cukup baik yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Kemudian meskipun terdapat beberapa bulan *self assessment system* mengalami penurunan namun secara keseluruhan pelaksanaan *self assessment system* sudah terlaksana dengan optimal menunjukkan wajib pajak sudah mempunyai awareness dalam pemenuhan tanggung jawab pajaknya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang diadakan oleh (Satriawaty Migang, 2020) yang menjelaskan terdapat pengaruh positif signifikan antara *self assessment system* terhadap penerimaan PPN.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel penagihan pajak ,nilai tukar rupiah ,Inflasi, dan *self assessment system* sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat terbukti.
2. Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat terbukti.
3. Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat terbukti
4. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat terbukti

5. Nilai koefisien determinasi sebesar 46,7% yang menjelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 46,7 %. Sedangkan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Implikasi

Pada penelitian ini memberikan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, manfaat atau keuntungan sebagai warga negara dengan membayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu bagi pihak penagih pajak hendaknya selalu memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas pemeriksaan, efektifitas penagihan, sehingga selalu dapat memberikan kontribusi yang baik pada bagian pemeriksaan maupun penagihan dimana pegawai pajak yang bersangkutan terus meningkatkan kualitas agar menjadi pemungut pajak (fiskus) yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maupun penagihan.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah :

1. Rentang periode yang digunakan pada penelitian ini hanya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

### 5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian pada kantor pajak yang lain sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan lagi penelitian ini dengan cara menambah variabel ekonomi lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN sehingga dapat diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Nadia, Universitas Trisakti, and Jakarta Tri Kunawangsih. 2023. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN Di Indonesia Periode 2005-2020." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*. Vol. 1.
- Aryanti, Dinar. n.d. "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya."
- Desmon, Desmon, and Hairudin Hairudin. 2020. "Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 2 (1): 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>.
- Febriana, Cyntia. 2022. "Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." Vol. 1.
- "Ghozali\_Imam\_2018\_Aplikasi\_Analisis\_Mult."
- Istimemonda, Ginarti, Eva Anggra Yunita, Teguh Budi Raharjo, and Makmur Sujarwo. 2023. "Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer* 3 (2): 72–86. <https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42>.
- Kena, Pengusaha, Pajak Terhadap, Penerimaan Pajak, Pertambahan Nilai, Tongam Sinambela, and Suci Rahmawati. n.d. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah."
- Kurnia, Kurnia, and Nabila Azzahra. 2024. "Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN." *Owner* 8 (1): 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>.
- Marta, Tito, and Sugema Dasuki. 2022. "Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*. Vol. 1.
- Migang, Satriawaty, and Ruky Dwi Dirmayani. 2017. "Nomor 02." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 20.
- Nadia, Putri, and Rayna Kartika. 2020. "Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2): 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>.

- Nilai Tukar Rupiah, Pengaruh, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar Author Nur Fitri, Junaidin Zakaria, and Aryati Arfah. n.d. "PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI Volume 3. No. 1 (2020); Januari."
- Pemeriksaan, Dan, Pajak Terhadap, Penerimaan Pajak, Pertambahan Nilai, Studi Kasus, Pada Kantor, Pelayanan Pajak, Pratama Mulyorejo, Yulia Eka Cahyono, and Adiati Trihastuti. 2023. "Pengaruh Self Assessment System." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 3 (1). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Penulis, Tim, Jemmy J Pietersz, Benjamin Carel Picauly, Andi Yusuf Katili Mersy Yoslin Ririhena, Made Dwi Ferayani, Mertayani Sari Dewi Moh Faisol, Nia Kurniati, Amelia Sandra, Galih Wicaksono, and Hilda Salman Said Gandy Wahyu Maulana Zulma. 2021. *PERPAJAKAN TEORI DAN PRAKTIK*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com).
- Sapridawati, Yeni, Novita Indrawati, and Azhari Sofyan. 2021. "PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI" 2 (1): 2722–5437.
- System, Al-Mashaadir ; Pengaruh Self Assessment, Money Ethics, and Dan Teknologi Dan Informasi. 2019. "PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI TAX EVASION (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA LANGSA)." Vol. 1. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com).
- "View of SELF ASSESSMENT SYSTEM, INFLASI DAN NILAI TUKAR BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PPN & PPNBM DI DKI JAKARTA (KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT DAN UTARA)." n.d.